

ABSTRAK

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organ utama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, namun struktur keanggotaan tetapnya yang tidak berubah sejak 1945 dinilai semakin tidak merepresentasikan realitas geopolitik abad ke-21. Konflik yang terus berlangsung di Ukraina dan Gaza mempertegas ketidakmampuan Dewan Keamanan dalam menjalankan mandatnya secara efektif akibat penggunaan hak veto oleh anggota tetap, sekaligus memperkuat urgensi reformasi struktural yang telah lama diperjuangkan berbagai negara, termasuk Jepang. Sebagai kontributor finansial terbesar PBB dalam kurun waktu 2020-2024 dan negara yang paling sering terpilih sebagai anggota tidak tetap sepanjang sejarah PBB, Jepang memiliki landasan legitimasi yang kuat untuk memperjuangkan keanggotaan tetap Dewan Keamanan sekaligus mendorong reformasi struktural yang lebih inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi diplomasi Jepang dalam upayanya menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 2005-2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka, data diperoleh dari situs resmi pemerintah Jepang, dokumen kebijakan luar negeri, publikasi akademik, serta pidato para tokoh politik. Penelitian ini menggunakan konsep Diplomasi Publik Mark Leonard yang mencakup tiga dimensi, yaitu *News Management*, *Strategic Communication*, dan *Relationship Building*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang secara sistematis membangun narasi reformasi melalui forum domestik dan internasional, memanfaatkan platform media sosial Kementerian Luar Negeri sebagai instrumen komunikasi strategis, serta memperluas basis dukungan internasional melalui koalisi G4 dan kemitraan bilateral dengan kawasan Afrika dan Asia Tengah. Hingga akhir periode penelitian, Jepang memang belum berhasil meraih keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, berbagai strategi yang telah dijalankan selama ini telah meletakkan dasar diplomasi yang kuat sebagai bekal bersama untuk terus mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB ke depannya.

Kata kunci: Diplomasi Publik, Reformasi Dewan Keamanan PBB, Jepang

ABSTRACT

The UN Security Council is the principal organ responsible for the maintenance of international peace and security; however, its permanent membership structure, which has remained unchanged since 1945, is increasingly considered unable to represent the geopolitical realities of the 21st century. The ongoing conflicts in Ukraine and Gaza have underscored the Security Council's inability to effectively carry out its mandate due to the use of the veto by permanent members, while further reinforcing the urgency of structural reform that many countries, including Japan, have long advocated for. As the largest financial contributor to the UN between 2020 and 2024 and the country most frequently elected as a non-permanent member throughout UN history, Japan holds a strong basis of legitimacy to pursue permanent membership on the Security Council while pushing for more inclusive structural reform. This study aims to analyze Japan's diplomatic strategy in its efforts to become a permanent member of the UN Security Council during the 2005-2024 period. Using a qualitative descriptive approach through a literature study method, data were obtained from official Japanese government websites, foreign policy documents, academic publications, and political speeches. This study applies Mark Leonard's Public Diplomacy concept, which encompasses three dimensions: News Management, Strategic Communication, and Relationship Building. The findings indicate that Japan has systematically constructed a reform narrative through domestic and international forums, leveraged the Ministry of Foreign Affairs' social media platforms as instruments of strategic communication, and expanded its base of international support through the G4 coalition and bilateral partnerships with Africa and Central Asia. By the end of the study period, Japan had not yet succeeded in securing permanent membership on the Security Council. Nevertheless, the various strategies it has carried out have laid a strong diplomatic foundation as a shared basis for continuing to push for Security Council reform in the future.

Keywords: *Public Diplomacy, UN Security Council Reform, Japan*